

Bupati Bogor Sampaikan Program Pancakarsa di Tenjo

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan, sejumlah program Pancakarsa untuk Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, baru baru ini.

Program-program tersebut disampaikan Bupati saat melaksanakan kegiatan Rebo Keliling (Boling) virtual di Kecamatan Tenjo bersama Wakil Bupati Bogor, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Ade Yasin menjelaskan program Bogor Cerdas di Kecamatan Tenjo di antaranya, rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP (Madrasah) dalam waktu 3 tahun, yakni SDN Bojong 4, SDN Bojong 3, SDN Batok 02, SDN Babakan 03, SDN Singabraja, dan SMPN 1 Tenjo. Kemudian, penambahan ruang kelas baru SD dan SMP, pemberian Kartu Bogor Cerdas (Bodas), pemberian beasiswa putra dan putri daerah berprestasi, PKBM untuk santri salafiyah dan kejar paket C.

"Bogor Sehat di antaranya, pemberian Kartu Bogor Sehat/ atau JKN, peningkatan gizi, ketahanan pangan dan gerakan Bogor Anti Stunting, pelayanan Bogor Siaga," jelasnya.

Untuk Bogor Maju, lanjut Ade, yakni peningkatan pelayanan publik melalui pembentukan 7 UPT dan layanan three in one, kantor BPN dan imigrasi, layanan antar e-KTP, KK, KIA, Akta, dan lain-lain bekerjasama dengan kantor Pos, career center informasi lowongan pekerjaan di website www.bogorcareercenter.bogorkab.go.id, bantuan desa tertinggal, pengembangan BUMDES,

festival wisata desa, dan beli produk UMKM.

"Untuk Bogor Membangun, ada pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala pemukiman Desa Babakan, pembangunan tangki - septik skala individual Desa Ciomas, pemantapan infrastruktur jalan desa dan kabupaten dengan betonisasi, bedah kampung untuk 4 Rutilahu, pembangunan jembatan gantung Rawayan kp. Dugud Biuk Desa Babakan, fasilitas wifi gratis, prasarana dan sarana air minum dan drainase (WTP Tenjo), serta pembangunan stadion mini Kecamatan Tenjo," papar Ade Yasin.

Bogor Berkecandaban, ungkap Ade Yasin, yakni Boling, Jumat Keliling (Jumling), program 1.000 hafidz Qur'an, beasiswa Pancakarsa untuk para hafidz Quran, bedah Pontren. Selanjutnya insentif bagi para pelaku pembangunan yakni, guru gaji sebesar 200 ribu per bulan, Linmas 300 ribu per bulan, tunjangan Posyandu 1 juta rupiah per tahun, RT dan RW 500 ribu per bulan, guru madrasah 250 ribu per bulan, guru PAUD atau RA, Amil, serta penyuluh agama honorer sebesar 2,4 juta rupiah per tahun.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bogor juga meresmikan Water Treatment Plant (WTP) Tenjo serta meresmikan Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Tenjo. Untuk diketahui Boling virtual di Kecamatan Tenjo dilakukan untuk menjangkau aspirasi serta keluhan warga masyarakat agar Bupati dan Wakil Bupati lebih dekat dengan warga masyarakat. ● **gio**

BPBD: Sungai di Kabupaten Bandung Sudah Dangkal

BANDUNG (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mengungkapkan kondisi sungai-sungai yang ada termasuk Sungai Citarum sudah mengalami pendangkalan karena sedimentasi. Akibatnya, hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu membuat air sungai cepat meluap ke pemukiman warga sekitar.

Kepala Harian BPBD Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara mengatakan penyelesaian banjir di Kabupaten Bandung harus melibatkan banyak pihak seperti BBWS dan Dinas PUPR.

Saat ini kondisi sungai di Kabupaten Bandung sudah banyak yang dangkal. "Harus ada langkah konkrit seperti normalisasi kita coba mengkoordinasikan persoalan ini supaya sungai saat ini cukup dangkal akibat sedimentasi dari longsor an atas (hulu)," ujarnya saat dihubungi, Minggu (28/3).

La menuturkan, pengerukan sedimentasi harus terus

dilakukan untuk menormalisasi sungai. Selain itu, masalah lain yang muncul terkait kondisi sungai yang mengalami penyempitan akibat terdapat bangunan-bangunan yang menghambat laju air."

Aliran sungai terhambat air dan akan menimbulkan luapan sungai meluber ke rumah warga," katanya.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bandung hingga Sabtu (27/3) pukul 21.00 Wib, banjir di Kecamatan Dayeuhkolot terjadi di Desa Citerup, Kelurahan Pasawahan dan Desa Dayeuhkolot.

Korban yang mengungsi 40 jiwa dengan jumlah warga terdampak mencapai ribuan jiwa.

Di Kecamatan Baleendah, banjir terjadi di Kelurahan Baleendah dan Kelurahan Andir dengan warga terdampak ribuan orang.

Sedangkan banjir di Kecamatan Bojongsong terjadi di Desa Tegalar, Desa Bojongsari dan Desa Bojongsong. ● **pur**

MASIH ANDALKAN BPHTB DAN PBB

Target PAD Kota Bogor Masih di Bawah Rp1 Triliun

BOGOR (IM) - Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi membeberkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Rp966,9 miliar pada 2021. Target tahun ini belum mencapai angka Rp1 triliun dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid-19 Kota Bogor sehingga pergerakan ekonomi dinilai belum sepenuhnya normal.

"Target PAD tersebut merupakan hasil perhitungan potensi di tengah masa pandemi Covid-19. Sehingga pada 2021, target PAD belum menyentuh di angka satu triliun. Target (PAD 2021,red) tentunya hasil penyesuaian sesudah adanya Covid-19. Jika sebelum adanya Covid-19, PAD tahun 2020 target awal itu Rp1,83 miliar, tapi ada penyesuaian pada saat refocusing, kemudian di APBD Perubahan. Jadi target (PAD) di tahun 2021 tetap ada penyesuaian," ungkap Lia saat dikonfirmasi pada Minggu (28/3) pagi.

Lia juga mengatakan, untuk PAD dari sumber penerimaan pajak daerah pada tahun ini sebesar Rp651 miliar. Bapenda optimis dengan target tersebut di tengah kondisi saat ini akan tercapai setelah melihat proyeksi laju pertumbuhan ekonomi nasional membaik sebesar 5 persen pada tahun ini.

"Ini artinya memberikan harapan bahwa ekonomi akan

tumbuh yang tentunya dibarengi dengan selesainya vaksinasi," tambahnya.

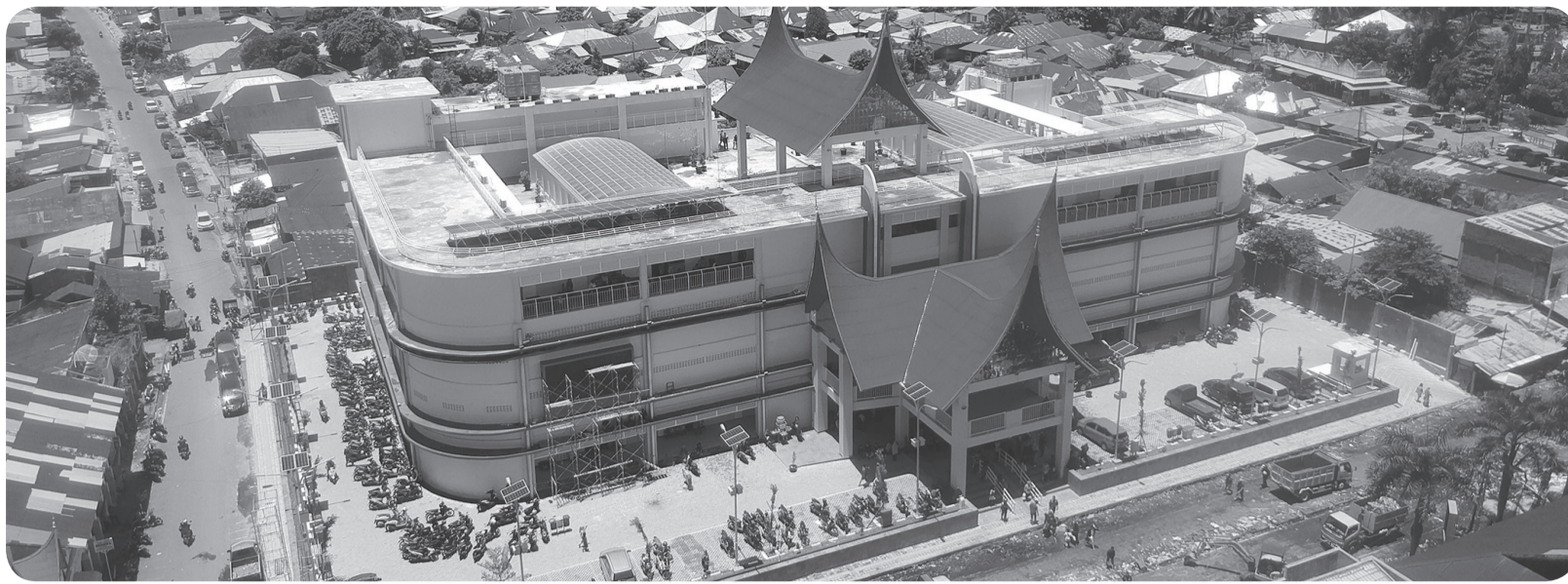
Lia membeberkan, dari sembilan sektor pajak daerah, ia melihat capaian dari BPHTB pada Januari sampai Maret 2021 tidak begitu berpengaruh dengan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Ini menggambarkan mungkin bagi masyarakat kelas atas tahun 2020 masih menunggu perkembangan selanjutnya. Tetapi ketika tahun 2021 mulai membelanjakan uang untuk membeli rumah, misalnya," bebarnya.

Lia menjelaskan, begitu juga pada sektor PBB. Kemudian dari sisi PBB, karena pihaknya mengeluarkan kebijakan diskon dari Februari 15 persen, Maret 10 persen dan April 5 persen, antisiasme masyarakat untuk memanfaatkan saat diskon cukup baik membayarkan PBB lebih awal. Namun Lia mengakui untuk capaian dari sektor pajak hiburan dan hotel menunjukkan masih rendah pada Februari dan Maret, jika dibandingkan dengan 2020 pada periode yang sama.

"Iya, BPHTB dan PBB ini diharapkan bisa menutup defisit dari sisi pajak hiburan dan hotel. Untuk restoran turun tapi tidak signifikan. Saya berharap dengan vaksin yang tuntas, pergerakan ekonomi normal kembali dan target PAD lebih dari satu triliun lagi," pungkasnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PASAR RAKYAT PARIAMAN

Foto udara Pasar Rakyat Pariaman yang sudah selesai dibangun di Pariaman, Sumatera Barat, Minggu (28/3). Pasar Rakyat yang direvitalisasi Kementerian PUPR dengan anggaran Rp89,74 miliar tersebut kini sudah mulai ditempati pedagang dan dibuka untuk umum dengan konsep ramah lingkungan dan tahan gempa serta mendukung kegiatan pariwisata karena berada di dekat Pantai Gandorih.

Tunggu Eksekusi Pemkot, PPJ Siap Kelola Pasar Tekum

Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir mengatakan, pihaknya tetap percaya diri Pemkot Bogor dengan berbagai upaya dapat segera mengambil alih pengelolaan Pasar Tekum Kemang.

BOGOR (IM) - Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) menyatakan siap mengelola Pasar Teknik Umum (TU) Kemang atau Pasar Tekum Kemang Tapi masih menunggu rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan eksekusi pengalihan alih pengelolaan pasar di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanahsareal itu.

Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir mengatakan, pihaknya tetap percaya diri Pemkot Bogor dengan berbagai upaya dapat segera mengambil alih pengelolaan Pasar Tekum Kemang.

"Ditargetkan, paling lambat akhir Maret ini. Apalagi setelah kunjungan Forkopimda beberapa waktu lalu, sudah dibentuk tim untuk merealisasikan pengalihan alih pengelolaan Pasar Tekum. Sejatinya kita menunggu pemkot untuk ambil alih," ungkap Muzakkir kepada wartawan pada Minggu (28/3).

Muzakkir melanjutkan, meski demikian, Perumda PPJ tetap harus menyiapkan segala sesuatunya untuk pengelolaan pasar Tekum Kemang itu.

"Yang jelas dengan proses ini, kami percaya diri, pengalihan Pasar TU bisa segera direalisasikan Maret ini, atau

sebelum Ramadan sepertinya," tambahnya.

Sebelumnya, paska Pemkot Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan bersama ke Pasar Tekum Kemang Pemkot menargetkan segera mengambil alih pengelolaan Pasar TU dari PT Galvindo Ampuh, namun dengan catatan dugaan pungutan liar (pungli) serta pelanggaran akan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, persoalan pengelolaan pasar Tekum ini menjadi ramai setelah adanya penyampaian aspirasi pedagang pasar atas semrawutnya sampah namun retribusi kebersihan pedagang tetap dipatok tinggi, sehingga meminta perhatian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat menyelesaikan persoalan tersebut.

"Dan yang telah berjalan adalah aspek non litigasi

(musyawarah atau negosiasi), namun jika diperlukan kepastian hukumnya akan diambil jalur litigasi (penegakan hukum), karena jika dibiarkan hal ini akan berlarut-larut dan berdampak pada opini masyarakat seolah-olah Pemerintah Kota Bogor tidak bisa tegas untuk segera menuntaskan persoalan yang terjadi," ungkap Alma kepada wartawan di Balai Kota Bogor pada Kamis (25/3) lalu.

Alma menegaskan, kebijakan yang diambil tentunya tetap mengedepankan komunikasi dengan PT Galvindo Ampuh, namun faktanya beberapa opsi yang telah dibicarakan tidak bisa diperoleh titik temu, berawal adanya Perjanjian Kerjasama yang dibuat bersama pada tahun 2001 dengan klausul hak pengelolaan dikembalikan ke Pemerintah Daerah pada tahun 2007 tidak kunjung dilaksanakan sampai sekarang.

"Dan adanya pernyataan PT Galvindo Ampuh yang menyatakan Pasar Tekum adalah milik yang bersangkutan, tentunya ini juga menjadi pemicu ketegangan karena mengikatkan seolah-olah ada negara lain dalam wilayah NKRI di Kota Bogor, meskipun Pemkot Bogor selama ini terus mengupayakan komunikasi dengan cara baik, namun keresahan memuncak dari pedagang karena adanya pungutan yang cukup tinggi dimasa Pandemi Covid-19 oleh manajemen PT Galvindo," tambahnya.

Alma menegaskan, kebijakan untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Tekum tidak dapat ditunda-tunda lagi, sesuai

saran pendapat dari beberapa pimpinan instansi, akademisi dan pengamat agar dilakukan penanganan segera dengan cara tidak melanggar hukum. Tentunya dengan landasan hukum legal formil pertama dengan menghentikan semua operasional retribusi yang diambil oleh PT Galvindo dan mengembalikan sesuai kedudukannya pengelolaan Pasar Tekum kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) sesuai SK Walikota pada tahun 2012.

"Ya, kedua memberikan waktu kepada PT Galvindo untuk segera memenuhi kewajibannya dan menjelaskan kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor adanya dua kali pembayaran parkir dan pembayaran lainnya tanpa membayar retribusi ke Pemerintah sesuai Peraturan Wali Kota Bogor," tegasnya.

Masih kata Alma, poin ketiga terhadap potensi hilangnya penerimaan keuangan negara yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2007 sampai sekarang atau pungutan liar yang dilakukan oknum di Pasar Tekum akan dilaporkan agar diproses oleh APH.

"Keempat Pemerintah Kota Bogor, TNI/Polri, BPN, pemangku kepentingan, komunitas pedagang dan masyarakat di Pasar Tekum secara bersama-sama mendengar penjelasan PT Galvindo menyangkut data aset tanah bangunan dan hak-hak yang sesuai regulasi untuk dilakukan lanjutan pemetaan," pungkasnya. ● **gio**

563 Huntap Siap Ditempati Warga Korban Banjir Cigudeg

CIBINONG (IM) - Warga korban banjir bandang di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor bakal segera mengisi hunian tetap (Huntap) yang hampir selesai dibangun. Sebelum mengisi huntap, masyarakat bakal melakukan pengundian nomor rumah.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Agus Suyatna menjelaskan, saat ini ada 563 huntap yang akan diisi oleh warga. Meski demikian, jumlah tersebut belum mencakupi beberapa kebutuhan warga seperti listrik, air bersih, juga drainase.

"Setelah semua itu selesai, baru lah diisi oleh warga. Nanti kami juga meminta arahan dari kementerian untuk pengisian Huntap tersebut," ujarnya.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Lestiana Irmawati mengatakan, meski saat ini pembangunan 563 huntap hampir selesai, namun jumlah tersebut masih belum cukup memenuhi kebutuhan

hunian korban bencana. Jumlah Huntap tersebut, dikatakan Irma, masih kurang dari kebutuhan.

Sebab, jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana pada 2020 silam mencapai hampir 2.000 ribu KK. "Memang masih kurang, tapi kan kami terus berusaha untuk melakukan pembangunan Huntap secara bertahap," ujarnya.

Pembak Bogor, saat ini tengah mengajukan permohonan pembangunan 500 Huntap kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 500 Huntap kepada pemerintah provinsi, dan 500 Huntap lainnya ke Kemen-PUPR.

Namun, mengenai kapan pembangunan tersebut bisa rampung, Irma mengaku tidak bisa memberikan komentar banyak mengenai hal ini. Lantaran pembangunan Huntap ini bakal dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat.

"Kami belum bisa pastikan kapan selesainya, soalnya yang mengerjakan langsung dari pemerintah pusat. Kami Pembak Bogor hanya menyediakan lahan," ucapnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

BANJIR DI KOTA BANDUNG

Pengendara melintasi banjir di Cingised, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/3). Hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu (27/3) membuat kawasan tersebut terendam banjir luapan Sungai Cironggeng setinggi 30 hingga 60 sentimeter.

Pemkot Sukabumi Gerakkan Program Tani Bangkit

SUKABUMI (IM) - Sejumlah upaya dilakukan agar bisa bangkit dari dampak pandemi khususnya di bidang ekonomi. Salah satunya di Kota Sukabumi diluncurkan Program Tani Bangkit berupa launching tanam perdana ubi jalar di Kampung Kubang, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Sabtu (27/3).

Program yang digagas Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) ini bekerjasama dengan Alfamidi, BMT Darussalam serta petani lokal. "Kegiatan ini untuk membangkitkan ekonomi warga di masa pandemi Covid-19," ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Pada acara ini hadir Direktur Utama Lazismu Muhammad Sabet Abilawa, pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Sukabumi, serta kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Sehingga pemkot memberikan apresiasi atas dipilihnya Kota Sukabumi dalam program tani bangkit untuk membangkitkan perekonomian warga.

Di mana kata Fahmi, pada pandemi saat ini membutuhkan dukungan dari semua pihak dan tidak bisa pemerintah sendiri melainkan melibatkan semua elemen dengan kolaborasi.

Terlebih angka kemiskinan naik secara nasional akibat dampak pandemi karena ekonomi terhenti.

Oleh karenanya lanjut Fahmi, dampak pandemi ini harus disikapi dengan kolaborasi dan sinergitas agar ekonomi bisa pulih kembali.

Salah satunya melalui Program Tani Bangkit yang dapat menjadi salah satu cikal bakal untuk kebangkitan ekonomi agar memiliki optimisme.

Kegiatan kolaborasi ini ungkap Fahmi, untuk meningkatkan ekonomi warga dalam kondisi pandemi.

Pemda siap berkolaborasi dengan Lazismu dan elemen lainnya khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Fahmi mengatakan, wilayah yang dipilih untuk program ini sangat tepat. Sebab daerah tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dari segi aspek kegiatan perekonomian.

Direktur Utama Lazismu Muhammad Sabet Abilawa mengatakan, program tani bangkit ini digagas Lazismu karena masuk pilar ekonomi pemberdayaan petani.

Sebab tidak hanya bantuan modal, pelatihan dan pendampingan melainkan program sinergitas berbasis komunitas.

"Program ini kerjasama dengan Alfamidi dan BMT Darussalam 6 untuk luasan 6 hektare," kata Muhammad Sabet.

Nantinya pengelolaan tanaman diserahkan kepada warga dan hasil panen sudah ada yang akan membelinya. ● **pur**